

## Kebebasan Beragama dalam Negara Demokrasi: Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera

### *Freedom of Religion in a Democratic State: Perspectives on the Thoughts of the Prosperous Justice Party Elite*

Moh. Nurhakim

Universitas Muhammadiyah Malang

#### Article Info

##### Article history:

Received 08 June, 2023

Revised 29 June, 2023

Accepted 10 July, 2023

##### Kata Kunci:

Kebebasan Beragama;  
Negara Demokrasi;  
Pemikiran Elit

##### Keywords

*Religious Freedom;  
Democracy country;  
Elite Thinking*

#### ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menganalisis secara kritis pemikiran beberapa elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seputar kontroversi tafsir kebebasan beragama dalam konteks negara demokrasi di Indonesia. Fokus penelitian menjelaskan ideologi dan gerakan PKS, serta konstruksi pemikiran elite PKS tentang kebebasan beragama. Melalui pendekatan kualitatif-fenomenologis, dengan teknik wawancara mendalam, lalu dikonfirmasi dengan dokumen resmi partai serta literatur yang relevan, diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, PKS merupakan partai politik yang dibangun di atas ideologi Islamisme-moderat. Transformasi gerakan dimulai dari komunitas dakwah-Tarbiyah menuju gerakan politik. Kedua, berkenaan dengan masalah kebebasan beragama, para elite PKS berpandangan bahwa kebebasan beragama dalam konteks demokratisasi di tanah air dimaknai sebagai hak individu untuk memilih dan menjalankan agama. Bukan bebas keluar agama dan apalagi menista agama lain atas nama kebebasan. Sebagai Sikap toleran diperlukan. Adapun sikap elite terhadap pemeluk agama lain, pengikut aliran sesat, sekedar perlu toleransi (tasamuh). Mereka juga mengakui pluralitas agama dan keyakinan sebagai realitas, tanpa meyakini semua agama benar berdasar keyakinannya. Untuk menjamin terjadinya toleransi dan menghindari kasus penistaan agama, menurut mereka, diperlukan penegakan hukum.

#### ABSTRACT

*This research seeks to critically analyze the thoughts of some elite Prosperous Justice Party (PKS) regarding the controversy over the interpretation of religious freedom in the context of a democratic country in Indonesia. The focus of the research is to explain the ideology and movement of the PKS, as well as the construction of the thoughts of the PKS elite on religious freedom. Through a qualitative-phenomenological approach, with in-depth interview techniques, then confirmed with official party documents and relevant literature, the following results were obtained. First, PKS is a political party built on the ideology of moderate Islamism. The transformation of the movement starts from the da'wah-tarbiyah community to a political movement. Second, with regard to the issue of religious freedom, PKS elites are of the view that religious freedom in the context of democratization in this country is interpreted as an individual's right to choose and practice a religion. As a tolerant attitude is needed. As for the attitude of the elite towards followers of other religions, followers of heretical sects, tolerance (tasamuh) is needed. They also recognize the plurality of religions and beliefs as a reality, without believing that all religions are true based on their beliefs. According to them, to ensure tolerance and avoid blasphemy cases, law enforcement is needed.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



#### Corresponding Author:

Moh. Nurhakim  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: [nurhakim@umm.ac.id](mailto:nurhakim@umm.ac.id)

#### LATAR BELAKANG

Di awal era reformasi muncul dan berkembang pesat gerakan-gerakan Islam baru di Indonesia bagai jamur di musim hujan. Gerakan-gerakan ini antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Tabligh, Front Pembela

Islam (FPI), Jamaah Salafi, dan lain-lain.

Salah satu gerakan yang belakangan menjadi sorotan oleh banyak kalangan adalah gerakan Tarbiyah yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu disebabkan karena gerakan ini dapat dikata muncul secara fenomenal dan kontroversial. Fenomenal karena berkembang secara cepat, dan mampu menarik perhatian banyak pihak. Selain itu, ia berhasil mendirikan cabang-cabang di beberapa daerah seluruh tanah air. Dukungan awal secara signifikan pun datang dari kaum muda aktivis kampus-kampus papan atas. Sementara disebut kontroversial, karena kehadiran PKS tak jarang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Perasaan khawatir pada sebagian masyarakat luas, tetapi pada saat yang sama menjadi harapan bagi sebagian masyarakat lain yang simpatik.

Pro-kontra masyarakat itu mendorong banyak kajian dilakukan. Menurut beberapa kajian terdahulu terdapat keunikan di dalam partai ini. Pertama, ideologi gerakannya cenderung revivalistik. Sebagai gerakan revivalis, misalnya PKS berpandangan bahwa: (1) Islam adalah manhaj al-hayah (sistem kehidupan) yang bersifat universal dan menyeluruh (syumul); (2) Islam adalah agama dan negara (al-din wa al-daulah); (3) kembali kepada Islam yang sebenarnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah; dan, (4) mengidealkan masa depan masyarakat, negara dan peradaban dalam kerangka Syariah Islam.

Kedua, dalam memahami teks dan realitas, pada prinsipnya metode yang ditempuh PKS selaras dengan gerakan revivalisme lainnya yang cenderung tekstual. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir, sejalan dengan tuntutan realitas politik di tanah air, PKS mulai mempertimbangkan pendekatan-pendekatan kontekstual dan objektivikasi, bukan Islamisasi. Slogan "Bersih, Peduli dan Profesional" dengan langkah-langkah baru menunjukkan sisi nasionalitas dan contoh dari pergeseran orientasi gerakan. Meskipun pilihan ini sering kali mengundang pertanyaan masyarakat luas tentang jati diri PKS.

Bahkan, menurut Greg Fealy, partai ini memiliki keunikan dan gaya tarik tersendiri karena menawarkan pendekatan baru dalam berpolitik. PKS (1) mengambil sumber inspirasi ideologi dan organisasi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir; (2) satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini; (3) satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial yang luas dan efektif; (4) menjadikan moralitas dalam kehidupan publik sebagai program utama politik; dan (5) partai yang sangat serius tentang masalah ideologi dan kebijakan dibanding partai-partai besar yang lain (Yon Machmudi, 2005).

Hal lain yang menarik dicermati dalam partai ini adalah kesan inkonsisten belakangan ini terhadap wacana demokratisasi dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang timbul sekitar pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan beragama, berbudaya, dan isu-isu gender. Apakah dalam hal ini PKS lebih bersikap adaptif atau sebaliknya dibanding gerakan-gerakan revivalisme yang lain. Jika pada visi Indonesia yang dicita-citakan PKS, yaitu "terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat" (Tim PKS, 2007), tampak di sini PKS konsen dan sejalan pemikirannya dengan pikiran-pikiran baru tentang demokratisasi di tanah air. Namun, jika dilihat pada realitas, terkadang kesan inkonsistensi terjadi pada sikap warga PKS, khususnya berkenaan dengan beberapa kasus HAM yang sulit dipahami oleh pihak lain. Misalnya isu-isu gender dan kebebasan beragama.

Berkenaan dengan masalah kebebasan beragama misalnya, memang beberapa politikus PKS mengakui adanya kebebasan beragama, perlunya toleransi, bukan pluralisme yang diartikan membenaran atau penyamaan agama-agama. Namun, bagaimana hal tersebut menurut para elite dan ulama PKS di mana otoritas pemikiran dan keagamaan berada pada mereka. Bagaimana sikap dan tindakan mereka jika terjadi konflik antarumat beragama, munculnya aliran sesat dan agama atau aliran baru. Dan, juga bagaimana pandangan mereka terhadap isu pindah agama. Jika mereka selama ini menyatakan bahwa pilihan agama adalah bebas, tetapi apakah bebas juga memilih untuk tidak beragama dan pindah agama.

Jika belakangan ini sikap politik PKS menunjukkan gejala "menengah" atau moderat, dan tampak bersikap makin "religius-nasionalis", maka bagaimana hal itu dihadapkan pada tuntutan kebebasan beragama di masyarakat yang belakangan menunjukkan gejala kuat. Seperti, bebasnya kaum Muslimin memberikan dukungan kepada aliran sesat, agama baru, pindah agama, dan aliran kepercayaan yang bukan agama.

Dari pemikiran di atas, pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini adalah, pertama, bagaimana gambaran yang sebenarnya tentang PKS baik ari segi ideologi maupun gerakan? Kedua,

bagaimana kontruksi pemikiran elite PKS tentang isu-isu kebebasan beragama dalam konteks negara demokrasi di Indonesia?

## **METODE**

Untuk menjawab pertanyaan di atas, dalam penelitian digunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan dikonfirmasi dengan kajian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Informan terdiri dari para elite PKS yang berjumlah lima orang tersebar di seluruh Indonesia yang dipilih dengan mempertimbangkan representasi kompetensi dan posisi. Mereka adalah Ustadz Hilmi, Ustadz Surahmat, Ustadz Tifatul Sembiring, Ustadz Anis Mata, dan Ustadz Mudzofar.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Transformasi dari Gerakan ke Partai Politik**

Untuk mengenal secara mendalam, pembahasan mengenai perkembangan PKS akan dilihat dari dua tahap transformasi. Pertama, tahap terbentuknya sebuah gerakan dakwah yang disebut dengan nama Tarbiyah sebagai asas. Kedua, tahap perkembangan gerakan dakwah menjadi gerakan sosial dan partai politik.

### **Lahirnya Gerakan Tarbiyah**

Salah satu keunikan PKS dibanding dengan partai-partai politik lain adalah transformasi dari sebuah gerakan dakwah di kalangan mahasiswa Muslim menjadi sebuah partai politik. Bahkan, gerakan mahasiswa itu muncul dari kampus-kampus umum yang biasa dianggap sebagai kampus “sekular”, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya (UB), dan lain-lain lagi. Persoalan yang perlu dibahas, bagaimana sebuah gerakan yang semula dipandang sebelah mata yang, kemudian mengalami transformasi menjadi sebuah partai yang diperhitungkan.

Dalam konteks ini, di pertengahan tahun 1970-an hingga 1980-an telah terjadi peningkatan kesadaran keagamaan di kalangan mahasiswa. Mereka gemar mengkaji Islam di masjid-masjid, mushalla-mushalla, rumah-rumah, dan ruang-ruang sekitar kampus. Kajian-kajian itu dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri sekitar sepuluh peserta, dan dibimbing oleh seorang tutor yang disebut murabbi. Sementara kelompok-kelompok kecil ini kemudian dikenal dengan istilah usrah (keluarga) (Mahmud, 1999).

Pada tahun 1980-an mereka memperluas skop kajian, dan mulai menginstitusikannya melalui gerakan yang disebut Tarbiyah (Mahmud, 1999). Tujuannya tidak lain adalah mendidik pribadi-pribadi menjadi orang yang kuat agamanya. Gerakan ini meliputi aktivitas-aktivitas kependidikan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan secara intensif baik di kampus maupun di luar kampus. Bahkan, untuk memperluas skop dakwah dan memberikan pengaruh, mereka mendirikan lembaga dakwah yang disebut Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Berdasarkan pengkajian terhadap sumber-sumber resmi PKS dan data sekunder, elemen-elemen pembentuk gerakan itu minimal ada lima. Yaitu, (1) Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang berperanan sebagai pendiri pertama dakwah di kampus dan perancang dasar-dasar strategi dakwah. (2) Lembaga Dakwah Kampus (LDK), yang berperanan sebagai penggerak utama dakwah di kampus. (3) Para alumni pendidikan tinggi luar negeri khususnya Timur Tengah sebagai mentor tarbiyah sekali gus transmitter ideologi manhaj, dan pemikiran. Bahkan para alumni dari pendidikan tinggi Barat mengambil peran mensuplai konsep-konsep sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik Barat. (4) Aktivis organisasi sosial Islam dan angkatan muda Islam adalah sebagai pengelola organisasi dakwah. Dan, (5) para lulusan pesantren menjadi pengajar materi keislaman dan menjadi mentor pengalaman ajaran Islam sekaligus menyumbangkan pengalaman berdakwah dalam masyarakat (Rahmat, 2008).

Dari sistem pelatihan yang diadakan dalam LMD tersebut berhasil melahirkan para tokoh generasi ketiga PKS yang datang dari kampus umum seperti Mahfudz Siddik, Muzammil Yusuf, Radzikun, Fahri Hamzah, Mustafa Kamal, Zulkiflimansyah, Priatna, Suswono, dan Rama Pratama (Rahmat, 2008). Sebagian besar mereka ini sekarang menjadi anggota DPRt, dan memimpin PKS.

**Tabel 1.** Beberapa Nama Tokoh Perintis PKS Berdasarkan Kategori Generasi

Generasi Pertama	Generasi Kedua	Generasi Ketiga
1. Salim Segaf al-Jufri	1. Hidayat Nurwahid	1. Anis Matta
2. Rahmad Abdullah	2. Surahman Hidayat	2. Aunurrafiq
3. Helmi Aminuddin, <i>et.all</i>	3. Tifatul Sembiring	3. Jazuli Juwaini
	4. Satori Ismail	4. Muhamad Syamlan
	5. Daud Rasyid	5. Mahfudz Siddiq
	6. Abdul Hasif	6. Muzammil Yusuf
	7. Untung Wahono	7. Fahri Hamzah
	8. Mutammimul Ula, <i>et all.</i>	8. Mustafa Kamal, <i>et all.</i>

Setelah gerakan Tarbiyah tersebar di kampus-kampus seluruh Indonesia, dan kader-kadernya pun merasa perlu memperluas lingkup dakwah, mereka bersepakat mendirikan satu lagi elemen pendukung gerakan dakwah. Terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada musyawarah nasional Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) ke-10 yang diselenggarakan di Masjid AR. Fachrudin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 26-29 Maret 1998. Salah satu dasar kelahirannya adalah suatu keprihatinan para aktivis mahasiswa Muslim terhadap krisis nasional yang melanda bangsa Indonesia. Untuk menyelesaikan krisis tersebut, menurut KAMMI, hendaklah dilakukan reformasi di seluruh bidang: politik, ekonomi, hukum, budaya, dan moral (Sidiq, 2003). Dengan berdirinya KAMMI, berarti gerakan Tarbiyah telah mentransformasikan diri ke dalam skop dakwah yang lebih luas. Melalui sarana yang baru ini, mereka dapat berwacana dalam masalah-masalah sosial, rakyat, politik dan negara. Bahkan, organisasi ini amat aktif menyuarakan tuntutan Soeharto meletakkan jabatan sebagai presiden melalui aksi-aksi demo dan lobi-lobi dengan berbagai kekuatan politik dan masyarakat. Bersamaan dengan kekuatan lain, akhirnya Soeharto pun dapat dijatuhkan pada 21 Mei 1998.

### Menjadi Partai Politik

Jika dalam Tarbiyah orientasi gerakan ditekankan kepada pembentukan kader-kader yang handal, maka dalam gerakan politik orientasi ditekankan kepada pembinaan akses-akses dan institusi-institusi politik. Selanjutnya, bagaimana memasukkan kader-kader Tarbiyah terpilih ke dalam institusi-institusi tersebut guna mengambil peran-peran penting dalam mengelola negara. Oleh karena itu, agenda-agenda gerakan politik PKS dalam tahap ini diorientasikan kepada tiga hal. Pertama, penguatan partai, membuat efektif struktur dan jaringan partai, dan memastikan pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Kedua, membuat citra positif terhadap partai dan para aktor-aktornya. Ketiga, mempercepat proses mobilitas horizontal dan vertikal kader-kader partai guna menguasai sumber-sumber otoritas politik.

Pertama, setelah jatuhnya Presiden Soeharto, era reformasi telah dimulai. Terbuka peluang bagi umat Islam untuk mengekspresikan cita-cita politik yang selama ini dalam keadaan tertekan. Para kader gerakan Tarbiyah memanfaatkan peluang ini untuk mendirikan partai-partai Islam. Berdirilah Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar Jakarta. Musyawarah pimpinan partai menetapkan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il, M.Sc sebagai presiden partai, Dr. Salim Segaf al-Jufri sebagai Ketua Dewan Syura, dan Anis Matta sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun jumlah kader dan pendukung saat itu mencapai lebih dari 30.000 orang (Sidiq, 2003).

Kedua, oleh karena sedikitnya perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 1999, PKS terus bekerja keras membuat struktur dan jaringan yang makin efektif, mempartingkatkan jumlah struktur, dan memastikan pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Pada Pemilihan Umum tahun 1999, struktur PKS hanya menjangkau 1500 struktur peringkat desa, sedangkan pada Pemilihan Umum tahun 2004 telah meningkat menjadi lebih dari 9.000 struktur tingkat desa (Sidiq, 2003). Program-program tambahan yang diutamakan pelaksanaannya adalah seperti kunjungan door to door, kerja dan bantuan sosial, berkunjung para tokoh-tokoh, memanfaatkan media komunikasi, memobilisasi massa pada masa kampanye, mengawal Pemilihan Umum, menentang praktek money

politic, meningkatkan kerjasama dengan partai-partai lain, meningkatkan dana iuran Paratai, berolah raga dan qiyam al-layl, jawlah da'wah, dan terus menerus meluruskan niat kader-kader dalam berdakwah (1-DPP, 2004).

Ketiga, pada tahun 2004-2009, PKS berusaha mempercepat mobilitas vertikal kader. Setelah para kader dan institusi politik dipersiapkan, PKS berusaha mempercepat dan memperbanyak kader-kader terpilih menempati posisi-posisi penting di pusat-pusat kekuasaan. Berusaha memperbanyak kader-kader yang berhasil menjadi anggota DPR dan Menteri, PKS membuktikan penambahan jumlah kader yang dapat menempati pos-pos eksekutif. Bulan November 2009 PKS -- melalui kerjasama dengan partai-partai lain -- berhasil memenangkan 9 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari 20 Pilkada Provinsi; dan memenangkan 120 Pilkada dari 180 Pilkada yang diikuti PKS di level Kota atau Kabupaten). Ir. Tifatul Sembiring terpilih sebagai Presiden PKS pada tahun 2005-2010 (1-DPP, 2004).

Strategi dan usaha-usaha telah dilakukan secara sistematis dan gigih, namun pada Pemilihan Umum tahun 2009, PKS hanya mampu menaikkan sedikit suara, yaitu 8.206.955 (7,88 %) (KPU, 2009) dari suara pemilih nasional, dan hanya mendapat 45 anggota DPR, sama dengan jumlah anggota DPR dari PKS pada Pemilu tahun 2004. Meskipun demikian, oleh karena PKS mencoba membangun kerjasama dengan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pertama Pemilu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono memberikan mandat 4 orang PKS sebagai menteri.

**Tabel 2.** Perbandingan Perolehan Suara PKS dalam Tiga Pemilu

Tahun Pemilu	Jumlah Kader Utama	Menteri – Gubernur - Bupati	Perolehan Suara	% Suara Tingkat Nasional	Jumlah Struktur Partai	Perolehan Kursi di DPR
1999	35.000	1	1.436.563	1,2	1.500	7
2004	450.000	3 – 1	8.325.020	7,34	9000	45
2009	975.000	4 - 9 – 120	8.206.955	7,88	25.000	57

Jika dalam Tarbiyah, orientasi gerakan ditekankan kepada pembentukan kader-kader yang handal, gerakan politik orientasi pula ditekankan kepada pembinaan akses-akses dan institusi politik, maka dalam gerakan sosial ditekankan kepada pengembangan asas-asas sosial kemasyarakatan. Gerakan tarbiyah, politik dan sosial-kemasyarakatan berjalan seiring. Kedua-duanya bersinergi, dan saling mendukung antara satu sama lain. Sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan, PKS mengembangkan peran-peran sosial melalui strategi membangun dan memanfaatkan institusi-institusi ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan media komunikasi kemasyarakatan. Institusi-institusi pendidikan dan dakwah yang pernah dibangun antara lain adalah: sekolah-sekolah Taman Kanan-kanak Islam Terpadu, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Pendidikan Al-Hikmah, Lembaga Bimbingan Belajar Nurul Fikri, Lembaga Dakwah Khairu Ummah, dan taman-taman bacaan umum. Sedangkan institusi-institusi pelayanan kesehatan masyarakat antara lain adalah Pos Wanita Keadilan (POW WK) yang salah satu fungsinya adalah memberi bimbingan kesehatan kepada masyarakat. Adapun institusi-institusi media komunikasi antara lain adalah: kelompok Nasyid, majalah Sabili, dan beberapa penerbit buku seperti Gema Insani Press, Pustaka al-Kautsar, Robbani Press, Al-Ishlahy, Era Intermedia, dan As-Syamil.

PKS tidak sekadar hanya membangun institusi-institusi saja, namun juga turut memperkuat institusi-institusi sosial yang memberikan layanan lebih luas jangkauannya kepada masyarakat seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ), dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Sementara institusi yang melibatkan bidang kewanitaan adalah organisasi seperti Salimah dan Pos Wanita Keadilan. Selain itu juga, terdapat bidang penguatan ekonomi yang membangun dan menangani Serikat Pekerja Keadilan (SPK) dan Koperasi Syariah Indonesia (KASINDO). KASINDO membina jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), dan sejak tahun 2003 mendirikan dan membina Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI).

Demikian perkembangan PKS yang dimulai dari sebuah gerakan dakwah kemudian berubah menjadi gerakan dakwah dan sosial, lalu menjadi gerakan politik.

## **Konstruksi Ideologi**

Untuk mengenal konstruksi ideologi PKS, perlu dianalisis dan dirujuk ide-ide elite dan pimpinan partai yang telah diinstitusikan ke dalam diri partai menjadi apa yang disebut dengan nama ideologi partai. Sebagaimana hal ini tercatat dalam dua buku utama PKS, yaitu *Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan* (Tim MPP-PKS, 2007b). Buku pertama berisi faham Islam dan akidah yang dianut PKS; dan, asas-asas pemikiran filosofis yang dirumuskan tokoh PKS tentang keadilan, individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, pendidikan, sains, gender, dan kesejahteraan yang dipakai bagi asas-asas menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sementara buku kedua membahas visi, misi, dan platform kebijakan pembangunan sebagai arah dan pedoman perjuangan kader. Buku kedua ini lebih terperinci dari buku pertama. Untuk mengenal ideologi PKS, kajian ideologi berikut didasarkan pada kedua buku tersebut. Seterusnya ke dua buku akan dirujuk dalam pembahasan berikut.

## **Faham Islam dan Akidah**

Sebagai partai Islam, PKS berusaha mendasarkan semua program dan kegiatan kepada Islam sebagaimana diyakini dan dianut. Keyakinan terhadap Islam tidak hanya menjadi dasar platform, program dan kegiatan partai, tetapi merupakan akidah dan fikrah yang membentuk keperibadian para elite dan anggota partai. Seterusnya corak faham atau keyakinan terhadap Islam bagi para anggota partai akan menentukan cara-cara mereka menjalankan kegiatan politik. Dengan perkataan lain, apa yang tampak dalam PKS adalah tidak dapat dilepaskan dari corak faham anggota partai terhadap Islam dan akidahnya.

Minimal Islam dalam konstruksi pemikiran para tokoh PKS dipandang dalam tiga perspektif. Yaitu, Islam sebagai agama fitrah (din al-fitrah); Islam bersifat universal (kaffah); dan Islam sebagai jalan hidup (manhaj al-hayah). Perspektif ini sangat jelas sebagaimana dikemukakan berikut:

“Islam sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada kehendak Allah yang dimanifestasikan di dalam wahyu-Nya, dalam keseluruhan sistem alam, dan di dalam keseluruhan proses sejarah, merupakan din al-fitrah, sistem hidup yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Oleh sebab itu pesan-pesan yang disampaikan memiliki watak fitrah dan bersifat universal. Islam adalah manhaj al-hayah (jalan hidup) dan sistem yang menuntun dan mengarahkan kehidupan, menetapkan hukum, dan mengawasi perilaku manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT” (Tim MPP-PKS, 2007b).

## **Indonesia yang di Cita-citakan**

Termasuk bagian dari elemen-elemen ideologi PKS yang lain adalah apa yang terangkum dalam visi dan misi partai. Visi dan misi partai antara lain, merupakan respons pemikiran para elite dan pimpinan partai berkenaan dengan gambaran Indonesia pada masa depan yang mereka cita-citakan. Sebagaimana dirumuskan dalam *Anggaran Dasar (AD) PKS*, bahwa visi partai ini adalah seperti berikut. Pertama, terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)*. Kedua, terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diredhai Allah SWT. dalam *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)* (Tim MPP-PKS, 2007).

Dari visi yang pertama, difahami bahwa visi partai ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam *Pembukaan UUD 1945*. Intinya adalah usaha untuk mendirikan sebuah negara yang berasaskan pada nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Intinya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini adalah argumen yang menunjukkan bahwa PKS adalah partai Islam yang memiliki komitmen kebangsaan sejajar dengan ideologi kebangsaan PKS.

Sedangkan visi kedua adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Bagi PKS, masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju; berasaskan kepada nilai-nilai, norma, undang-undang, moral yang didukung oleh keimanan, menghormati kemajemukan, bersikap terbuka, demokratik, dan bergotong-royong untuk menjaga kedaulatan negara.

Keadilan yang diinginkan oleh para elite PKS adalah suatu kondisi masyarakat Indonesia di mana entitas dan kualitas kehidupannya baik pembinaan politik, ekonomi, undang-undang, maupun sosial-kemasyarakatan diposisikan secara wajar dalam parameter yang tepat dan seimbang, tidak melampaui batas. Adapun masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan PKS adalah ke arah

pembangunan kebangsaan bagi memenuhi keperluan lahir dan batin manusia secara seimbang, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah (Tim MPP-PKS, 2007).

Bagi PKS eksistensi masyarakat madani juga dapat ditunjukkan melalui kedudukan bangsa yang bermaruah. Yaitu bangsa yang mampu menampilkan diri secara unggul, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya sehingga membangkitkan rasa hormat dan kagum dari bangsa-bangsa lain. PKS meyakini bahwa martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, budaya kerja, dan integritas diri yang pada gilirannya menjadikan bangsa itu produktif dan kreatif. Dalam platform PKS dinyatakan sebuah moto: “Kami menciptakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi seluruh umat manusia, agar bangsanya menjadi penyumbang tamadun manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai” (Tim MPP-PKS, 2007).

Visi di atas menggambarkan keinginan kuat PKS menjadi partai yang bervisi kebangsaan. Selanjutnya, untuk memperoleh pengakuan masyarakat umum sebagai partai yang berideologi kebangsaan, selain keislaman, maka para elit dan anggauta PKS mengadakan aktivitas-aktivitas yang menonjolkan isu-isu kebangsaan dari isu-isu keagamaan. Menjelang Pemilihan Umum tahun 2009, PKS mengadakan seminar-seminar bertajuk kebangsaan, mewacanakan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional, memilih wanita-wanita teladan, dan membuat iklan-iklan cinta tanah air di TV.

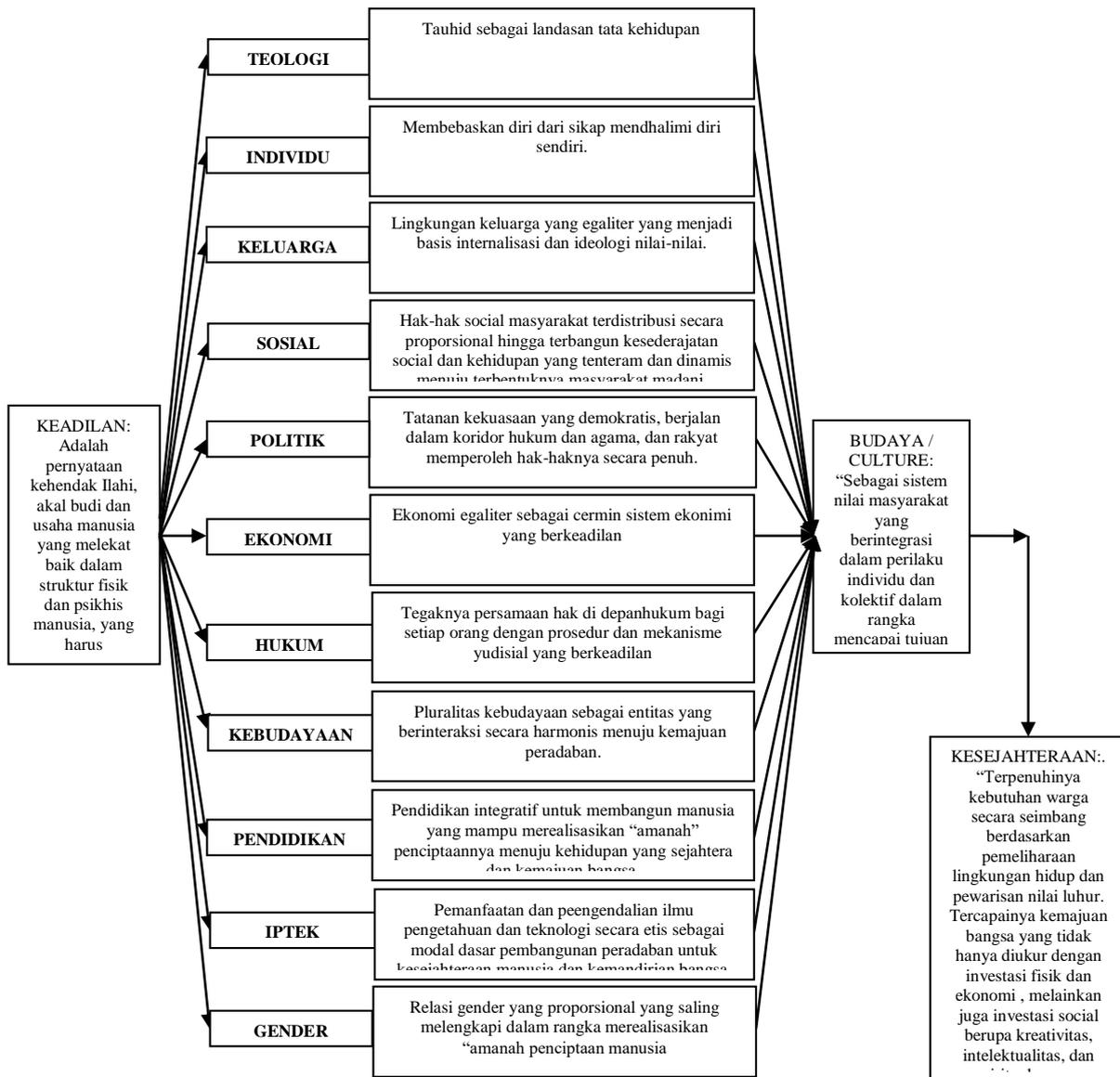
Untuk mewujudkan visi di atas, PKS menetapkan tiga misi yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, memelopori reformasi sistem politik, pemerintah dan birokrasi, mahkamah, dan tentera untuk tujuan penguatan proses demokratisasi. Kedua, mendorong wujudnya lapangan kerja yang seluas-luasnya dan layak demi kemanusiaan dengan tujuan menghapus kemiskinan, mendorong pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengarahkan pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang berpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera (Tim MPP-PKS, 2007).

Rumusan Misi PKS sebagai mana telah dikemukakan di atas memang berbeda dengan rumusan Misi PKS sebelum tahun 2005. Kalimat “menyebarkan dakwah Islam”, dan “mendukung penerapan ajaran Islam” tampak pada rumusan Misi sebelum tahun 2005. Sedangkan pada rumusan Misi yang sekarang kalimat itu dihilangkan (Tim MPP-PKS, 2007).

Perubahan misi ini menunjukkan belakangan ini tokoh-tokoh PKS menginginkan partai Islam ini semakin diakui oleh masyarakat umum sebagai partai yang bercorak kebangsaan. Hal ini wajar karena walau bagaimanapun PKS ingin masyarakat umum memberikan kepercayaan dan dukungan khususnya dalam kaitan dengan Pemilu. Selain itu, penonjolan PKS dari sudut kebangsaan merupakan usaha menterjemahkan faham Islam dalam bentuk kerja dan program yang konkrit seperti dirumuskan dalam misi partai. Faham Islam sebagai rahmat bagi segenap alam dan keyakinan Islam sebagai pemecahan masalah merupakan asas dalam melaksanakan syariah melalui saluran negara dan pemerintah.

### **Falsafah Dasar Perjuangan**

Elemen-elemen ideologi PKS yang lain adalah falsafah dasar perjuangan yang dirumuskan menjadi tiga belas asas. Tiga belas asas ini merupakan inti dari ajaran yang difahami berasaskan analisis terhadap keperluan bangsa Indonesia dan keyakinan terhadap ajaran Islam yang dapat memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Selanjutnya asas-asas ini dipakai oleh PKS untuk merumuskan platform kebijakan pembangunan masa depan Indonesia. Tiga belas asas dimaksudkan adalah keadilan, tauhid individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, ekonomi, hukum, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, gender, dan kesejahteraan. Berikut adalah gambaran secara keseluruhan dari Falsafah Dasar Perjuangan dalam kerangka (Tim MPP-PKS, 2007).

**Tabel 3.** Falsafah Dasar Perjuangan PKS

### Kebebasan Beragama dalam Perpektif Elite PKS

Kebebasan beragama merupakan masalah yang sering dipersoalkan oleh banyak orang ketika isu formalisasi syariah dibangkitkan. Pihak-pihak yang tidak setuju menganggap bahwa formalisasi syariah bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini adalah kebebasan beragama dan termasuk kebebasan mengikuti suatu keyakinan dan kepercayaan. Pihak-pihak yang paling khawatir terhadap efek negatif dari formalisasi syariah adalah golongan minoritas baik agama seperti non-Muslim, aliran kepercayaan, maupun kelompok Muslim sendiri yang anti terhadap formalisasi syariah.

Bagaimana pandangan dan sikap sebenarnya para tokoh PKS terhadap masalah kebebasan beragama di Indonesia dalam konteks alam demokratisasi. Untuk menjawab pertanyaan utama ini digunakan empat sub pertanyaan yang akan dikaji meliputi: (1) konsep kebebasan beragama; (2) toleransi dan pluralisme agama; (3) kedudukan minoritas non-Muslim; dan, (4) sikap terhadap aliran-aliran sesat.

### Konsep Kebebasan Beragama

Dalam konteks demokratisasi yang sedang berlangsung di tanah air, hal yang sering dipolemikkan adalah masalah kebebasan beragama. Apakah semua orang bebas menentukan pilihan

agama, pengamalan, dan keluar dari suatu agama. Meskipun kebebasan beragama bagi setiap individu dijamin oleh Undang-undang dan HAM, namun dalam realitas sering terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut. Seperti, perusakan tempat ibadah tertentu, menghina pemeluk suatu agama, pembulian seorang yang berpindah agama, dan tindak kekerasan terhadap pengikut suatu aliran sesat.

Terhadap masalah ini, elite PKS memberikan pandangan yang mendasar tentang konsep kebebasan beragama. Dalam buku *Falsafah Dasar Perjuangan*, PKS meyakini adanya hubungan yang logis antara tauhid atau penegasan keesaan Allah dan penegakan prinsip-prinsip kesamaan derajat sesama manusia yang diciptakan oleh Sang Khaliq. Bahwa keimanan terhadap keesaan Allah meniscayakan seseorang mengakui martabat manusia yang tinggi, berbeda-beda jenis, dan mempunyai derajat yang sama. Keyakinan ini didasarkan pada al-Quran surah al-Hujurat ayat 13.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (al-Hujuraat: 13).

Landasan teologis ini membawa kepada sebuah konsep pemikiran, bahwa secara prinsip, agama-agama monoteisme menganggap para pengikutnya bersaudara walaupun secara etnik dan asal-usul keturunan mereka berbeda. Oleh karena itu, pengakuan Islam terhadap konsep kesamaan derajat manusia baik dalam dimensi agama maupun sosial, merupakan salah satu daya tarik Islam yang terkuat dan konsep yang paling universal (Tim MPP-PKS, 2007).

Lebih lanjut para elite PKS berpandangan bahwa doktrin Islam jelas dan tegas menghargai setinggi-tingginya harkat manusia dan kemanusiaan. Karena penghargaan itulah maka, meskipun manusia tampak berbeda-beda dalam realitas sosiologis, namun semua manusia dipandang sama, dan yang membedakan antara mereka adalah ketakwaannya kepada Allah.

Oleh karena itu, dapat dipahami di sini bahwa manusia secara fitrah juga diberi kebebasan individual termasuk kebebasan beragama, “La ikraha fi al-din” (tidak ada pemaksaan dalam agama). Dalam arti bahwa manusia sejak dilahirkan telah melekat pada dirinya hak-hak memilih suatu agama.

Maka, jika ada pandangan HAM yang menghargai kebebasan manusia, menurut Ketua Dewan Syariah PKS Surahman, hal ini sejalan dengan pemikiran PKS. Dia mengatakan bahwa HAM, “Ada hal yang positif di dalamnya, menghargai manusia. Tetapi ia dalam konsep Barat yang individualistik, sehingga mengabaikan hak-hak kolektif” (Surahman Hidayat, 2007).

Sementara itu, Ustaz Hilmi Aminuddin menguatkan pandangan ini dengan pernyataan tegas sebagai berikut: “Islam meletakkan dasar ketulusan, kerelaan atau keikhlasan. Artinya pelaksanaan Islam pun atas dasar kerelaan (“La ikraha fi al-din” atau tidak ada paksaan dalam agama), apalagi memaksa agama lain, sebab Allah SWT telah memberi space untuk berbeda, “fa man shaa’ fal-yu’min wa man shaa’ fal-yakfur”, sebab hal tersebut bukan urusan kita” (Hilmi Aminuddin, 2008).

Pandangan di atas dikuatkan lagi oleh Ustaz Mudhofar, tokoh PKS Jawa Timur. Menurutnya konsep kebebasan beragama adalah sebagaimana dinyatakan oleh kitab suci al-Qur’an di atas. Kebebasan beragama juga meniscayakan sikap toleran kepada non-Muslim, dalam batas di luar masalah akidah. Namun, konsep kebebasan dan toleransi dimaksud tidak berarti bebas menista agama lain. Di mana orang boleh semau-maunya menista atau menghina agama atau keyakinan orang lain sebagaimana hal terakhir ini sering terjadi di Indonesia dengan dalih kebebasan beragama (Mudhofar, 2008).

Kebebasan memilih agama dalam Islam, menurut Mudhoffar, tidak berarti seorang bebas tidak menjalankan agama bahkan bebas keluar masuk lagi dari dan ke dalalam agama yang pernah dia peluk. Baginya, bebas menentukan agama hukumnya wajib konsisten menjalankan ajaran agama, tidak bisa seenaknya terhadap pengamalan ajaran agama yang sudah dipilih tersebut. Termasuk tidak bebas keluar dari agama tersebut. Meskipun pada hakikatnya dia boleh juga keluar agama tetapi hal itu ada prosedur dan mekanismenya dalam Islam.

### **Toleransi dan Pluralisme Agama**

Permasalahan utama sebenarnya bukan terdapat dalam konsep kebebasan beragama saja, tetapi dalam konteks demokratisasi di tanah air, justeru dalam realitas masyarakat tak jarang muncul ketegangan bahkan konflik antara Muslim yang mayoritas dengan non-Muslim yang minoritas.

Kelompok minoritas merasa masih ada masalah dengan pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia. Sementara bagi kaum Muslimin tidak melihat yang sedemikian itu. Intinya ada hubungan yang kurang harmoni antara kedua. Lalu bagaimana pandangan elit PKS terhadap masalah toleransi umat beragama.

Untuk memberikan respons terhadap masalah ini, seorang pendakwah PKS Ustaz Mudhofar dari Surabaya berpendapat bahwa prinsip hubungan antara umat Islam dengan umat non-Muslim sebagaimana difahami oleh PKS adalah bahwa dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama ada tiga hal. Yaitu, masalah akidah-ideologi, masalah ritual-ibadah, dan masalah undang-undang syariah yang menyangkut halal-haram. Kalau mencakup masalah tiga hal tersebut umat Islam bersifat eksklusif, tidak boleh saling bekerjasama, saling mengikut, dan apalagi mencampuraduk antarajaran agama (Mudhofar, 2008).

Sementara dalam kehidupan muamalah umum seperti sosial, ekonomi, dan lain-lainnya dimungkinkan dan dibenarkan untuk berinteraksi dan bekerjasama antara kaum Muslimin dan lainnya. Adapun dalam hal politik yang memang termasuk dalam bidang muamalah terbuka hubungannya. Walau bagaimanapun, menurut Ustazd Mudhofar, PKS tetap menggunakan skala prioritas dalam menetapkan perlu atau tidak bekerjasama. Dicontohkan, dalam hal koalisi, PKS mengutamakan partai yang secara ideologi lebih dekat. Tetapi tidak menutup kemungkinan koalisi dengan partai yang berbeda akidah, karena ini wilayah muamalah, mesti dilihat dari berbagai sudut. Ukurannya adalah kemaslahatan yang tanpa merusak akidah masing-masing (Mudhofar, 2008). Dalam hal ini, faktanya PKS sendiri membangun pernah berkualisi dengan PDS pada Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya, dan dalam keanggotaan PKS juga ada sebagiannya yang dari agama selain Islam di beberapa wilayah seperti Manokwari.

Sementara itu, Ustaz Mudhofar menyinggung masalah pluralisme. Pluralisme harus dibedakan dengan pluralitas (kemajemukan). Pluralitas berarti mengakui adanya kemajemukan agama dan budaya, maka hal ini tidaklah dilarang. Tetapi, pluralisme di sini mengandung sesuatu ideologi yang bisa membawa suatu keyakinan akan adanya kesamaan agama atau pembenaran terhadap sebuah agama yang lain, maka ini diingkari. Secara ideologis (baca: akidah), PKS meyakini hanya Islam yang benar, sebagaimana agama lain meyakini agamanya yang benar. Secara sosial, dakwah, politik PKS mengakui keberadaannya. Lebih lanjut dia memberikan alasan, bahwa “isme” dalam kata “pluralisme” itu berkenaan dengan sesuatu ideologi atau pemahaman tertentu (Mudhofar, 2008). Pandangan ini dikukuhkan dengan pandangan ustadz Tifatul Sembiring yang mencoba membedakan antara mengakui kemajemukan dengan menolak penyamaan semua agama benar.

### **Kedudukan Minoritas Non-Muslim**

Dalam hubungan dengan proses demokratisasi di tanah air di satu sisi, dan upaya partai Islam seperti PKS yang mengusahakan diterapkannya syariah, maka tuntutan dalam kaitan dengan kebebasan beragama sering muncul persepsi dan perasaan golongan minoritas bahwa jika syariah berhasil diformalkan, maka kedudukan agama selain Islam akan terancam. Bagaimana tokoh PKS memberikan pandangan terhadap masalah ini.

Menurut Dr. Surahman Hidayat, Islam jangan terlalu ditampilkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Islam agama yang sejalan dengan fitrah manusia, menjunjung tinggi moral, dan berorientasi kepada kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Beliau berpendapat, “syariah Islam diterapkan bukan untuk satu golongan, namun untuk semua golongan. al-Quran sendiri mengakui adanya realitas yang bersifat pluralistik” (Hidayat, 2007).

Menurut Surahman, untuk menjamin kesejahteraan hidup bagi siapa pun dan apa pun perlu aturan dan undang-undang ditegakkan. Beliau mengilustrasikan bahwa hukum sebagaimana dikemukakan Ibn Taimiyah dibagi menjadi dua bagian. Ada syariah munazzalah (langsung diturunkan sebagai wahyu), dan ada syariah (baca: hukum) muawwalah yang dibagi menjadi bagian yang bersifat tanzhimiyah (pengelolaan struktur) dan yang bersifat tanfidhiyyah (teknis). Aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku lebih banyak pada bagian syariah yang bersifat mu’awwalah-tanzhimiyah-tanfidhiyyah. Untuk itu, kata Surahman, untuk menjamin hak-hak minoritas negara perlu mengembangkan dan menegakkan undang-undang yang dalam kategori kedua, “mu’awwalah itu silakan ambil dari mana saja, sementara yang syariah munazzalah lebih bersifat khusus bagi orang-orang Islam” (Hidayat, 2007).

### **Sikap Terhadap Aliran-aliran Sesat**

Majlis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan beberapa aliran agama Islam antara lain ada yang dimasukkan ke dalam kategori sesat (baca: aliran sesat) seperti Ahmadiyah-Qadiyani yang hingga kini menjadi permasalahan besar bangsa Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan, jika dipandang dari segi UUD 1945 dan HAM oleh sebagian pakar, maka Ahmadiyah-Qadiyani berhak hidup di Indonesia, meskipun terdapat fatwa MUI tentang kesesatannya. Sementara mayoritas umat Islam berpandangan seperti MUI, bahkan mereka meminta gerakan ini dibubarkan. Ketika pemerintah belum memberikan sikap yang tegas dalam perkara ini, maka sebagian umat Islam mengambil tindakan kekerasan terhadap orang dan lembaga-lembaga Ahmadiyah. Maka, bagaimana pandangan para tokoh PKS terhadap masalah kebebasan aliran-aliran sesat ini dan khususnya Ahmadiyah-Qadiyani.

Menurut Ustaz Mudhofar PKS berpendapat bahwa aliran-aliran sesat -- dalam hal ini Ahmadiyah-Qadiyani -- sudah berada di luar Islam. Beliau memberikan argumen sebagaimana berikut: "Karena mereka melakukan penyimpangan dan tetap meyakini dirinya sebagai umat Islam. Ini yang menjadi potensi masalah yang terus-menerus. Kalau mereka menggunakan asas HAM, ini yang kita permasalahkan. Karena hal ini tidak termasuk kebebasan beragama, tetapi merupakan "kebebasan" menista agama Islam. Kita tidak akan mengusik mereka jika mereka memproklamkan sebagai agama tersendiri, tidak membawa-bawa al-Quran, Nabi Muhammad SAW" (Mudhofar, 2008).

Sementara itu di tengah-tengah gemuruhnya umat Islam yang menuntut kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan, Anis Matta menyatakan pendapatnya secara tegas, "Negara perlu melindungi sekte atau aliran yang ada di Indonesia. Termasuk Jemaah Ahmadiyah," Menurut Anis, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini diperlukan payung undang-undang yang jelas oleh pemerintah. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte. Alasan Anis, prinsipnya kekerasan harus dicegah, memang perbedaan kadang membuat bangsa Indonesia masuk ke dalam konflik. Sikap Anis di atas tidaklah tampak apakah Ahmadiyah dibubarkan seperti yang diminta oleh umat Islam yang lain, atau dibiarkan tetapi dilakukan pembatasan-pembatasan supaya tidak sampai dianggap menista agama Islam.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa pandangan elite PKS terhadap masalah kebebasan beragama adalah mengakui kebebasan beragama, perlunya toleransi, bukan pluralisme yang diartikan sebagai pembenaran atas yang lain atau penyamaan agama-agama. Kebebasan beragama bukan berarti bebas menista agama lain. Sementara itu, PKS menjamin penerapan syariah yang diperjuangkan oleh kaum Muslimin tidak mengancam hak-hak minoritas. Cara yang ditawarkan, negara memayungi hak-hak mereka dengan undang-undang atau aturan-aturan pula, dan menjamin tidak ada penyerangan terhadap orang yang menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya.

### **KESIMPULAN**

Studi ini menyimpulkan bahwa salah satu keunikan PKS dibanding dengan partai-partai politik lain adalah transformasi dari sebuah gerakan dakwah mahasiswa Muslim di kampus-kampus "sekuler" menjadi sebuah partai politik yang amat diperhitungkan. Dimulai dari sekitar awal tahun 1980-an sekumpulan para mahasiswa Muslim mengadakan kajian-kajian agama secara intensif dan kemudian mulai menginstitusikan diri melalui gerakan yang disebut Tarbiyah. Untuk memperluas lingkup dakwah dan memberikan pengaruh, mereka mendirikan lembaga dakwah yang disebut LDK. Gerakan ini sangat kuat, cepat berkembang dan amat dirasakan di kalangan kampus dan masyarakat sebagai sesuatu Islam yang memberi alternatif. Perkembangan yang cepat ini antara lain karena didukung oleh berbagai elemen kekuatan dan potensi umat yang mempunyai kesamaan visi, yaitu DDII, LDK, para alumni pendidikan tinggi luar negara khususnya Timur Tengah dan Barat, aktivis organisasi sosial Islam dan angkatan muda Islam, dan para lulusan pesantren.

Setelah gerakan Tarbiyah tersebar ke kampus-kampus seluruh Indonesia, dan kader-kadernya pun merasa perlu memperluas lingkup dakwah, mereka bersepakat menubuhkan satu lagi elemen pendukung gerakan dakwah. Maka, lahirlah KAMMI pada tanggal 26-29 Maret 1998. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan terjadi perubahan iklim politik mengarah kepada reformasi, maka gerakan dakwah Tarbiyah berjihad untuk memasuki gelanggang politik dengan mendirikan sebuah partai bernama Partai Keadilan (PK) yang kemudian pada tahun 2002 beralih nama menjadi PKS. Tujuannya adalah memperluas jangkauan dakwah dan mengamalkan Islam

dalam dan melalui struktur negara. Melalui partai baru ini, orientasi dakwah ditekankan kepada pembinaan akses-akses dan institusi-institusi politik; memasukkan kader-kader Tarbiyah terpilih ke dalam institusi-institusi tersebut untuk mengambil peranan-peranan penting dalam mentadbir negara. Sementara itu, dari segi ediloginya, di antara keunikan PKS adalah karena ia berideologi Islam yang bercorak revivalistik. Dalam arti bahwa di mana salah satu obsesinya adalah menerapkan syariah Islam. Keyakinan PKS terhadap Islam tidak hanya menjadi dasar bagi platform, program dan kegiatan partai, tetapi merupakan akidah atau fikrah yang membentuk keperibadian para tokoh dan ahli-ahli partai. Islam diyakini sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia (din al-fitrah); Islam adalah agama yang sempurna (kaffah) dan menyeluruh ajarannya (shumul); dan Islam sebagai jalan hidup (manhaj al-hayat).

Faham ideologi Islam yang begini mendorong PKS ingin mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diredai Allah SWT. dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan ideologi dan visinya, PKS berusaha mentransformasikan nilai-nilai Islam yang fundamental ke dalam kancah pembangunan negara yang diusahakan menjadi landasan moral. Nilai-nilai fundamental tersebut meliputi aspek-aspek dan tujuan-tujuan: keadilan, tauhid, individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, undang-undang, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, gender, dan kesejahteraan.

Kedua, berkenaan dengan masalah kebebasan beragama, para tokoh PKS mengakui adanya kebebasan beragama dalam arti bebas menentukan agama masing-masing tanpa pemaksaan. Orang yang sudah memilih suatu agama tentu tidak berarti bebas tidak menjalankan agama atau keluar-masuk dari agama yang dipeluknya.

Untuk mencapai keharmonisan kehidupan bersama dalam negara demokrasi, maka di antara para pemeluk agama perlu menegakkan toleransi. Dalam hubungannya dengan perlunya toleransi, para tokoh PKS menerima realitas kemajemukan agama dan keyakinan di Indonesia, bukan faham pluralisme yang diartikan pembenaran (pluralitas) agama lain atau penyamaan agama-agama. Di sisi lain, meskipun menerima faham toleransi dan pluralitas, namun, para tokoh PKS memberikan catatan bahwa kebebasan beragama bukan berarti bebas menista agama lain sebagaimana hal ini tak jarang terjadi belakangan ini dengan dalih kebebasan berekspresi dan beragama. Sementara itu, para tokoh PKS menjamin usaha dakwah dan politik Islam sebagaimana diperjuangkan oleh kaum Muslimin tidak mengancam hak-hak minoritas.

Cara yang ditawarkan, dalam konteks negara demokrasi, negara memayungi hak-hak mereka dengan undang-undang atau aturan-aturan pula. Kemudian perlunya penegakan hukum untuk menjamin tidak ada penyerangan terhadap orang yang menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya. Hal ini untuk menjamin kelompok minoritas agama dan aliran sesat dapat hidup sebagai elemen masyarakat di Indonesia dalam bingkai negara demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1-DPP, T. W. (2004). Buku Pegangan Kader dalam Upaya Pemenangan Pemilu. DPP.  
Ali Abdul Halim Mahmud. (1999). Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Eraintermedia.  
Hilmi Aminuddin. (2008). Wawancara Hotel Inna Grand Bali Beach.  
KPU. (2009). Hasil Akhir Pemilu Legislatif. KPU.  
M. Imdadun Rahmat. (2008). Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. LKIS.  
Mahfudz Sidiq. (2003). KAMMI Pergulatan Reformasi Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Intermedia.  
Mudhofar. (2008). Wawancara. Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW). Wawancara.  
Surahman Hidayat. (2007). Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Jabatan DSP PKS. Wawancara pada tanggal 2 Februari 2007.  
Tim MPP-PKS. (2007a). Bandingkan dengan Anggaran Dasar PKS.  
Tim MPP-PKS. (2007b). Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Majelis Pertimbangan Pusat PKS.  
Tim PKS. (2007). Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. MPP-PKS.  
Yon Machmudi. (2005). Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Politik Islam Indonesia. yamil Cipta Media.  
Abdul Aziz, et al. (1989). Gerakan Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.  
A.E. Priyono, et al (2003), Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: Demos.  
Anis Matta 2002), Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan. Jakarta: Pustaka Saksi.  
Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed) (1999), Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan. Jakarta LSAF-TAF.  
Bahtiar Effendy (2003), Islam and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS.  
Basyir, Abu Umar (2006), Ada Apa dengan Salafi Jawaban atas Tuduhan dan Koreksi terhadap Istilah Salaf,

- Salafi dan Salafiyah. Solo: Rumah Dzikir.
- Bamualim, Chaider S. et al., Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah & Bappeda Pemda DKI Jakarta, 1999/2000.
- Billah, M.M., "Gerakan Kelompok Islam di Yogyakarta", dalam Abdul Aziz, et al. (ed.) (1989). Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus. pp. 289-337.
- Bruinessen, Martin van (2002), "Genealogies of Islamic Radicalism in Indonesia". South East Asia Research 10 no.2 117-154.
- Burhan Bungin (ed.) (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2003), Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Chaidar (1419), Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total, c.4. Jakarta: Darul Falah.
- Casanova, Jose (1994), Public Religions in the Modern World. USA: The University of Chicago Press.
- Deliar Noer (1991), Gerakan Moderen di Indonesia 1900-1942. c.6. Jakarta: LP3ES.
- Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Esposito, John L. & John O. Voll (1999), Islam and Democracy. (Terj.) Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_ (1990), Islam and Politics. (Terj.) H.M. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_ (1994), The Islamic Threat: Myth or Reality? (Terj.) Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan.
- Federspiel, Howard M. (2001), Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: the Persatuan Islam (PERSIS), 1923 to 1957. Leiden: Brill.
- \_\_\_\_\_ (2006), Indonesian Muslim Intellectuals of the 20th Century. Singapore: ISEAS.
- Goenawan Permadi (2003). Fantasi Terorisme. Semarang: Mascom Media.
- Greg Fealy dan Anthony Bubalo (2007), Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia. (Terj.) Akh Muzakki, Bandung: Mizan, h. 30.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir (2001), Pemikiran Politik dalam al-Qur'an. Jakarta: GIP.
- Ibrahim, Abdulfatah Harun (2002), 'Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah dan Kebatinan. Kuala Lumpur: Jakim.
- Jamhari (2003), "Mapping Radical Islam in Indonesia". Jurnal Studia Islamika. Vol.10. No.3. 2003. pp.1-28.
- Khamami Zada (2002), Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju.
- Luthfi Assyaukanie (2004), "Democracy and the Islamic State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia", The Copenhagen Journal of Asian Studies, 20, 2003, pp.32-46.
- M. Natsir (2001), Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Jakarta: Media Dakwah.
- Moleong, Lexy J. (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, c.11. Bandung: Rosdakarya.
- Moh.Nurhakim (2011), "Gerakan Revivalisme Islam dan Wacana Penerapan Syariah di Indonesia: Telaah Pengalaman PKS dan Salafi" dalam Ulul Albab Jurnal Studi Islam. Vol. 12, N0.1, Tahun 2011.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih (2002), Al-Sakhwah al-Islamiyyah Dawabit wa Taujihat. Muhammad Ihsan Zainuddin (ter.). Jakarta: Darul Haq.
- Tim PKS (2007), Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta: MPP-PKS.
- Yon Machmudi (2005), Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Politik Islam Indonesia. Bandung: Syamil Cipta Media.